

Masa Depan Komunikasi, Masa Depan Indonesia

# GEPOLITIK DAN GEOSTRATEGI



Masa Depan Komunikasi,  
Masa Depan Indonesia:

# Geopolitik dan Geostrategi

Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI)  
Jakarta, 2014

Masa Depan Komunikasi, Masa Depan Indonesia:  
Geopolitik dan Geostrategi

*Editor :*

Sri Hastjarjo

*Reviewer :*

Sunarto

Inaya Rakhmuni

Cetakan Pertama:

November 2014

Diterbitkan Oleh:

Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI)

Jl. Dr. Saharjo Raya No. 111

Tebet, Jakarta Selatan, 12810

[www.iski.or.id](http://www.iski.or.id)

ISBN : 978-602-14699-7-2

## DAFTAR ISI

Daftar Pemikiran Konferensi Nasional Komunikasi	vii
Pengantar Editor	xiii
Bagian Satu	
Tatapan Komunikasi Perbatasan	
<i>Simetrasi Sitaan Di Perbatasan: Perkuatan Nasionalisme Sabah Ritonga</i>	1
<i>Conting The Margin: Menggagas Komunikasi Yang Egaliter Di Kawasan Perbatasan Indonesia</i> Iwan Awaluddin Yusuf	19
<i>Ruang Publik Di Kawasan Perbatasan: Merawat Nkri Melalui Penguatan Peran Sebagai Ruang Publik</i> Munawir Nazrudin	37
<i>Isu-Isu Penyiaran Di Perbatasan Provinsi Riau: Ancaman Politik Dan Ekonomi Yang Tidak Dikhawatirkan</i> Zaimul Ichwan	58

Penguatan Peran Jurnalisme Warga Dalam Geopolitik Perbatasan Indonesia-Malaysia Alyah Nur'aira Haem	76
--	----

## Bagian Dua

### Tantangan Identitas Bangsa

Interaksi Media Sosial Dalam Negara Multi-Kultur ( <i>Analisis Public Spheres Dan Komunikasi Antar Budaya Pada Kasus Penghinaan Florence Sihombing Terhadap Yogyakarta</i> ) Nawitoh Vera, Tigor Morris Marpaung	101
Politik Kebudayaan (Studi Kasus Tentang Kebijakan-Kebijakan Pembangunan Berbasis Budaya Di Pirwakarta) Betty Tresnawaty	118
Top Of Mind Merek Bangsa Indonesia Niken Febrina, Irwansyah	127
Radikalisme Dan Terorisme Pada Konteks Geopolitik Indonesia: Sebuah Tinjauan Komunikasi Dan Media Azhary Priyonggo	145
Pemberitaan Terorisme Di Indonesia Di Era Demokratisasi Media Indiwan Seto Wahya Wibowo	167
Membangun Budaya Komunikasi Anti Konflik Kepentingan Sebagai Budaya Baru Di Indonesia Arzoni	189
Media Massa Sebagai Pembentuk Karakter Dan Budaya Bangsa Nur Kholison	199
Membangun Identitas Nasional Dalam Film Indonesia Euis Komalawati	215

## Bagian Ketiga

### Kebijakan Geostrategis Komunikasi

<i>Konsep Cyber City Melalui New Media Dalam Mewujudkan Kota Bandung Juara</i> R. Indriyati Kamil, Hans Silvana	243
Komunikasi, Komunitas Dan Kota Hijau: Melacak Model Komunikasi Forum Komunitas Hijau (Fikh) Gura Menunjang Tata Kelola Kota/Wilayah Berwawasan Lingkungan Santi Indra Astuti, Tito Budianto	270
Kebijakan Komunikasi "Layanan Akses Internet" Menjelang Pemerintahan Baru (Studi Kasus Pusat Layanan Internet Kecamatan Di Provinsi Jawa Barat) Dedeh Fardiah, Rini Rinawati, Oji Kurniadi	298
Analisis Sistem Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Di Bengkulu Heri Budianto, Dewi Sad Tanti	318
Pengembangan Pasar Dan Informasi Pariwisata Indonesia Melalui Wom, Media Sosial Dan Iklan Virtual Dalam Upaya Meningkatkan Wawasan Nasional Pemuda Melati Tobing	343
<i>Communication Campaign, Youth, And Nation Building</i> Mediana Handayani	365
Biodata Penulis	383

## PENETRASI SIARAN DI PERBATASAN: PERKUATAN NASIONALISME

Rajab Ritonga  
Fakultas Ilmu Komunikasi  
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)  
ritonga16rajab@gmail.com  
ritonga\_rajab@moestopo.ac.id

### ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki perbatasan laut dan perbatasan darat dengan negara-negara tetangganya, dengan kondisi memperhatikan di bidang penyiaran. Siaran nasional dari ibukota negara maupun ibukota propinsi tidak tertangkap dengan baik di perbatasan, sedangkan siaran-siaran dari negara tetangga *spill over* terutama di perbatasan Indonesia-Malaysia, dan Indonesia-Singapura. Peredaran media massa cetak di perbatasan juga tidak memadai karena buruknya infrastruktur transportasi dan rendahnya minat beli maupun minat baca.



Luapan informasi dari negara-negara tetangga di perbatasan yang terus menerus dinikmati masyarakat, dapat menyebabkan melunturnya nasionalisme warga, sebab ketajaman komunikasi dan transportasi merupakan salah satu komponen utama integrasi nasional (Magenda, 2001). Bidang penyiaran di perbatasan, sejauh ini juga belum menjadi perhatian utama. Program acara siaran menyangkut perbatasan nyaris tidak ada, bahkan di tataran politik-birokrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak termasuk sebagai anggota pengurus di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Memajukan komunikasi di perbatasan dilakukan untuk memperkuat nasionalisme rakyat di sana melalui: (1) peningkatan/pembangunan infrastruktur penyiaran, (2) perkuatan penetrasi siaran, dan (3) menumbuhkan kembangkan lembaga penyiaran lokal. Dengan begitu, salah satu anasir disintegrasi bangsa yakni ketidakadilan (Sanardi, 1997; Magenda, 2001) yang berkepanjangan dapat dihilangkan, dan warga di perbatasan memperoleh haknya: mendapat informasi dari media massa nasional.

**Kata kunci:** penetrasi siaran, disintegrasi bangsa, nasionalisme.

## PENDAHULUAN

Sebagai negara maritim terbesar di dunia (*archipelago state*), Indonesia memiliki 17.504 pulau, dengan garis pantai 81.000 kilometer, dan luas wilayah mencapai 9.000.000 km<sup>2</sup>. Luas daratannya 3.000.000 km<sup>2</sup>, luas perairan kedaulatan 3.000.000 km<sup>2</sup>, dan 3.000.000 km<sup>2</sup> perairan sekeliling laut kedaulatan seluar 200 mil laut dengan hak berdaulat (*sovereign rights*) di atas maupun di bawah permukaan, serta di lapisan bawah dasar lautnya (Wahyono, 2007).

Wilayah Indonesia yang begitu luas itu, berbatasan darat sejauh 3.094,16 kilometer dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini (BNPP, 2012) di empat provinsi, sedangkan di laut berbatasan dengan India; Malaysia; Singapura; Thailand; Vietnam; Filipina; Palau; Australia; Timor Leste; dan Papua Nugini di 11 provinsi. Sebagian besar pulau-pulau yang berbatasan dengan negara tetangga itu terletak di jauh di depan (ada juga yang menyebabkan sebagai pulau-pulau terluar). Pulau-pulau itu terpencil, miskin infrastruktur, bahkan ada yang tidak berpenduduk.

Selain miskin infrastruktur, daerah perbatasan tidak mendapat akses yang memadai terhadap media massa, baik surat kabar, majalah, tabloid, radio maupun televisi. Informasi dari portal juga tidak memadai, karena keterbatasan akses internet. Penetrasi siaran dari radio dan televisi yang seharusnya bisa dinikmati secara merata dan luas, ternyata tidak sampai di pulau-pulau terluar terutama disebabkan ketiadaan stasiun relay, atau bahkan ketiadaan listrik. Hal serupa juga ditemui di perbatasan darat. Umumnya, siaran-siaran radio maupun televisi *free to air* dari Jakarta ataupun dari ibukota provinsi diterima dengan kualitas gambar dan suara yang tidak memadai karena masalah teknis infrastruktur penyiaran.

Pada sisi lain, penetrasi siaran dari negara-negara tetangga (*spill over*), terutama Malaysia, dan Singapura, cukup kuat sehingga bisa dinikmati masyarakat perbatasan. Reimbasan siaran dari negeri tetangga itu tidak mungkin dicegah karena Indonesia menganut kebijakan *open sky policy*. Juga tidak bisa dibalangi bila negara tetangga berupaya "mengarahkan" corong informasi milik mereka ke perbatasan sebagai bagian dari pencitraan negeri itu. Hal yang sama seharusnya juga bisa dilakukan Indonesia di perbatasan dengan membangun infrastruktur penyiarannya di sana hingga *spill over* ke seberang perbatasan.

Tujuan media nasional baru dapat dinikmati masyarakat bila menggunakan antena parabola atau televisi berbayar. Lemahnya penetrasi



siaran radio dan televisi seolah membuat daerah perbatasan menjadi daerah *blankspot*, padahal masyarakat di sana bertak untuk mendapatkan informasi, maupun hiburan dari siaran radio, televisi nasional dan lokal. Itu sebabnya, masyarakat di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Singapura, seperti di Kalimantan dan Riau Kepulauan, menjawab permasalahan itu dengan mengkonsumsi siaran dari negeri tetangga.

Pada sisi lain, program siaran mengenai perbatasan di radio maupun televisi nasional nyaris tidak ada. Konten siaran dari perbatasan pun tidak ada. Juga tidak ada yang peduli pada nilai penting liputan dari sana. Kondisi ini, sesungguhnya, melengkapi permasalahan daerah perbatasan yang seolah menjadi "daerah tidak berdaulat dalam ranah program penyiaran nasional". Padahal, perbatasan merupakan representasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara (Moeldoko, 2012).

Lemahnya penetrasi siaran lembaga penyiaran baik radio, dan televisi nasional di perbatasan merupakan permasalahan yang dibahas dalam paper ini yang dikaitkan dengan ketahanan nasional. Permasalahan penetrasi media di perbatasan tersebut semakin memprihatinkan dengan minimnya eksemplar media cetak surat kabar, majalah atau tabloid yang sampai ke sana karena sulitnya prasarana transportasi selain rendahnya minat beli dan minat baca masyarakat perbatasan. Kondisi itu diperparah dengan keengganan penerbit besar untuk melakukan ekspansi penerbitan ke daerah perbatasan.

Media massa cetak yang tergabung dalam penerbit besar, ternyata pemasarannya tidak menjangkau perbatasan, padahal Indonesia memiliki 1.324 media massa cetak yang terdiri dari 630 surat kabar harian dan mingguan, 694 tabloid dan majalah, dengan total sirkulasi 23,3 juta –9,4 juta eksemplar merupakan sirkulasi surat kabar harian (Siregar, 2013: 20). Bahkan, dari 323 penerbitan media massa cetak grup konglomerasi media

(Wikari, 2006: 21), tidak satupun yang terbit di daerah perbatasan. Grup penerbitan Jawa Pos, misalnya yang memiliki 108 surat kabar harian, tiga majalah dan 19 tabloid di seluruh Indonesia, tidak ada yang terbit di daerah perbatasan, meski grup itu memiliki koran di provinsi yang punya perbatasan darat maupun laut dengan negara tetangga, seperti di Kalimantan Timur (*Harian Kalimantan Post*), Kalimantan Barat (*Harian Anayra*, *Harian Equator*, *Harian Metro Pontianak*, *Harian Kao Tian Ri Bao*), Kepulauan Riau (*Harian Riau Post*, *Harian Damai Pos*).

Masyarakat di daerah perbatasan yang memiliki minat baca dan atau mempunyai daya beli, mendapatkan asupan informasi dari koran negeri tetangga yang mudah diperoleh di seberang perbatasan. Kondisi ini membuat masyarakat Indonesia di perbatasan mengkonsumsi informasi media massa cetak, sekaligus menerima asupan informasi dari radio dan televisi negeri tetangga. Keadaan yang berlangsung secara terus-menerus sepanjang tahun tersebut, secara tidak sadar, dapat memberi kontribusi terhadap kanturnya nasionalisme masyarakat Indonesia di daerah perbatasan. Hal ini dapat dilihat pada kasus adanya pemuda di perbatasan Kalimantan Barat yang diduga menjadi anggota paramiliter Malaysia, Laskar Wataniah tahun 2008 (lihat *Equator News*, Pontianak, 16 Februari 2008).

Untuk menjaga semangat nasionalisme diperlukan kehadiran media massa. Media massa merupakan salah satu wahana untuk mengikat rasa kebangsaan terutama di daerah perbatasan yang rentan dari ancaman penetrasi siaran asing sebab masyarakat yang mendapat berita dan informasi dari radio dan televisi negeri tetangga, sesungguhnya mengandung kecenderungan jangka panjang terutama dalam memperlemah nasionalisme. Melemahnya nasionalisme di perbatasan, menandakan momentumnya bila dihubungkan dengan bagusnya infrastruktur negara tetangga; harga-biaya kebutuhan pokok lebih murah serta adanya kemudahan akses transportasi menjangkau wilayah negeri tetangga. Akibatnya, banyak anggota masyarakat



"meny seberang perbatasan" untuk melakukan aktifitas ekonomi, berobat, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka di seberang.

Banyak variabel yang menyebabkan masyarakat meny seberangi perbatasan, namun tulisan ini hanya membahas persoalan yang terkait media massa di perbatasan, terutama yang berhubungan dengan penetrasi siaran di perbatasan.

## PEMBAHASAN

Masalah pembangunan di perbatasan dalam beberapa tahun ke belakang belum menjadi perhatian pemerintah. Daerah terpencil, terisolasi, dan tertinggal seperti perbatasan, belum menjadi prioritas (Paton, 2009: 22). Keadaan itu juga menyentuh bidang penyiaran yang merupakan urat nadi penyampaian informasi dari negara/pemerintah kepada rakyatnya, dan sebaliknya.

Wilayah Indonesia yang luas dengan rakyatnya yang majemuk, merupakan suatu tantangan untuk menyatakannya dalam sistem penyiaran nasional. Meskipun Indonesia sudah menggunakan sistem komunikasi satelit (Sistem Komunikasi Satelit Domestik) sejak tahun 1976, namun belum semua wilayah bisa terjangkau siaran radio dan televisi. Sebagai sebuah *nation-state*, tidak mudah menyatukannya dalam satu kerangka penyiaran yang menjangkau semua paku secara sempurna. Penyatuan Indonesia dalam satu sistem siaran tersebut, merupakan amanat Pasal 3 Undang Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002 yang menyatakan: tujuan penyiaran, salah satunya, adalah untuk memperkokoh integrasi nasional.

Penyiaran merupakan salah satu elemen penting dalam menegakkan integrasi nasional, sebab Indonesia yang luas dengan pulau-pulau yang banyak, hanya bisa dijangkau dalam waktu yang singkat bila menggunakan teknologi komunikasi. Dalam konteks seperti itu, ketiadaan informasi bisa

menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*). Keberadaan penyiaran menjadi penting di perbatasan yang secara fisik berbeda dengan daerah lainnya. Di daerah yang tidak berbatasan dengan negara lain, rakyat Indonesia tidak mempunyai perbandingan dengan rakyat negara lain. Berbeda di perbatasan, rakyat di sana dengan nyata melihat perbedaan negerinya dengan negeri seberang. Karena itu, kondisi di perbatasan sesungguhnya rawan pembinaan nasionalisme.

Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo (2008), telah mengidentifikasi isu-isu publik yang terdapat di perbatasan. Salah satu temuannya adalah: perbatasan selalu dijadikan wilayah perebutan antarnegara terutama dalam penentuan batas negara. Terkait dengan temuan itu, penetrasi media penyiaran ke daerah perbatasan harus gencar dilakukan agar masyarakat tidak selalu serapat siaran dari negara tetangga. Kehadiran siaran nasional maupun daerah di wilayah perbatasan diharapkan mampu sebagai penangkal atau penyeimbang siaran-siaran asing di perbatasan.

Masyarakat di perbatasan tidak mendapat asupan informasi yang memadai. Sebanyak 75 persen warga di sana mengakses siaran luar negeri, terutama dari Malaysia (Sumartono, 2014). Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai perbatasan laut dengan Malaysia, 80 persen wilayahnya tidak terjangkau siaran televisi Indonesia, sedangkan siaran dari Singapura, dan Malaysia menjangkainya 100 persen (KPI Pusat, 2012: 7) dengan meniknati siaran-siaran televisi Singapura (Channel 5, U Channel, Channel News Asia, Channel 8, Art Central, Kids Central), dan televisi Malaysia (TV9, RTM1, TV3, TV2, TV1). Siaran *free to air* dari kedua negara itu diterima dengan kualitas suara dan gambar sangat baik, sedangkan siaran televisi nasional: TVRI, Trans TV, RCTI, SCTV, MetroTV, MNC, dan televisi lokal: Batam TV, *Semburanjeng Televisi*, kualitas gambar dan suaranya tidak sempurna. Begitu juga siaran radio Singapura seperti Warna, Ria, Class,



*Symphony, Yes, Gold, Capital*; dapat ditangkap dengan kualitas siaran yang lebih bersih dibanding siaran radio Kepulauan Riau (KPI Pusat, 2012: 7).

Kondisi hampir sama terjadi di perbatasan darat Kalimantan Barat maupun Kalimantan Timur. Di kedua provinsi yang berbatasan dengan Malaysia itu, siaran televisi Malaysia mendominasi. Bahkan masyarakat Kalimantan Timur di perbatasan hanya menonton siaran televisi Malaysia, tidak pernah menonton tayangan televisi nasional. Di perbatasan Kalimantan Barat, terdapat 18 siaran radio dan 3 televisi dari Malaysia (TV1, TV2, TV3) yang secara leluasa memancarkan siaran-siarannya (KPI, 2012: 26).

Begitu juga warga masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina. Di sana masyarakat belum tersentuh siaran nasional, namun mereka mendapat asupan informasi dari televisi dari Pulau Mindanao, Filipina.

[...] masyarakat disana banyak dihibur lagu-lagu Filipina. Tidak ada lagu-lagu nasional yang di dengar karena memang siarannya tidak sampai ke sana, kata Wisyi Makagansa Rompia, istri bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, IIR Makagansa (lihat <http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/38-dalam-negeri/31276-masyarakat-perbatasan-di-kab-sangihe-rindu-siaran-nasional>).

Kondisi hampir serupa ditemui di Kalimantan Barat seperti di desa Tommy Johanda, Kepala Desa Sungai Kelie, Kecamatan Kutungau Huhu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, pada rubrik Reportase Warga (*Citra Jurnalistik*) di surat kabar Tribun Pontianak, 7 Februari 2014 (lihat <http://pontianak.tribunnews.com/2014/02/07/masyarakat-perbatasan-rindu-siaran-indonesia>):

[...] Radio Republik Indonesia (RRI) jarang sekali didengar, malah radio siaran Malaysia. Itulah yang setiap hari didengar. Siaran-siaran keragaman

Malaysia sampai hiburan-hiburan (nasihat dan lagu) setruanya antara Malaysia, bahkan banyak warga kita yang hafal lagu kebangsaan Malaysia. Yang tidak punya parabola tidak mungkin dapat nonton siaran TV Indonesia. Apalagi yang tinggal dekat garis batas, tanpa parabola, hanya pakai antena biasa bisa nonton siaran TV Malaysia.

Ketimpangan arus informasi di daerah perbatasan dengan minimnya penetrasi siaran-siaran nasional, dan derasnya tayangan dari negara-negara tetangga perlu mendapat perhatian dalam kerangka memperkokoh rasa nasionalisme, sebab daerah perbatasan merupakan tempat berinteraksi rakyat dari dua negara yang bertetangga dengan latar belakang budaya yang sama. Secara historis rakyat kedua negara yang berbatasan adalah satu cumpukan suku bangsa, namun berbeda kebangsaan. Kondisi ini bisa menimbulkan sentimen primordialisme.

Minimnya penetrasi siaran di daerah perbatasan in-line dengan terbatasnya infrastruktur yang ada di sana, sehingga dampak lanjutannya adalah kurang sejahteranya rakyat. Kondisi kawasan perbatasan tersebut relatif tidak banyak berubah dari sejak dahulu, meski sering dikunjungi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga secara sinis warga di sana mengatakan "Hanya malikat yang belum berkunjung ke sini" (BNPP, 2011: 1).

Minimnya infrastruktur di perbatasan antara lain meliputi keterbatasan jaringan jalan dan angkutan perhubungan (darat, laut, sungai), sarana dan prasarana komunikasi seperti pemancar atau transmisi radio, televisi serta telepon, sementara sarana dasar sosial dan ekonomi seperti sekolah, pasar, juga terbatas (Patton, 2009: 23). Dengan kondisi seperti itu mudah dipahami adanya ketertinggalan ekonomi masyarakat. Keadaan semakin sulit bila dilihat pada kenyataan rendahnya kualitas sumber daya manusia di kawasan perbatasan.



Meskipun pemerintah telah melakukan sejumlah pembangunan di kawasan perbatasan, namun secara umum daerah perbatasan masih minim infrastruktur sehingga pelayanan dasar terhadap masyarakat juga terbatas. Minimnya pembangunan infrastruktur terjadi karena panjangnya garis perbatasan. Selain itu fokus pembangunan infrastruktur lebih mengarah ke perkotaan ataupun kawasan padat penduduk. Infrastruktur umum di kawasan perbatasan yang belum tersedia dengan baik itu, termasuk di dalamnya adalah infrastruktur penyiaran.

Partisipasi swasta untuk ikut membangun infrastruktur penyiaran di daerah perbatasan tidak dapat diharapkan karena tidak menjanjikan keuntungan ekonomis, meskipun Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah mengambil keputusan khusus memberi kemudahan pejinan penyiaran di daerah perbatasan (KPI Pusat, 2012). Pada sisi lain, persoalan penetrasi media di perbatasan tampaknya belum menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah lebih fokus pada persoalan mengatasi masalah-masalah politik, ekonomi, hukum, pertahanan keamanan di perbatasan. Hal itu dapat dilihat pada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Menteri Komunikasi dan Informatika tidak termasuk anggota pengurus BNPP. Pengelola BNPP adalah: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Pengarah), Menteri Koordinator Perekonomian (Wakil Pengarah I), Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Wakil Pengarah II), Kepala BNPP dipegang menteri dalam negeri, dengan anggota-anggota: Menteri, Menteri, Menteri, Menteri, Menteri, Menteri, Menteri Kelautan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, dan Gubernur provinsi terkait perbatasan.

Pada hal, kemajuan di bidang komunikasi dan transportasi merupakan salah satu komponen utama integrasi nasional selain ideologi nasional, sistem pendidikan nasional, dan partai politik (Magenda, 2001). Kesenjangan

infrastruktur yang terjadi terus menerus di perbatasan, dapat menimbulkan keputusasaan bagi masyarakat di sana, dan bisa memunculkan perasaan diperlakukan tidak adil. Keadilan merupakan salah satu unsur dari disintegrasi bangsa (Sunardi, 1997). Dalam kaitan itulah keberadaan penyiaran menjadi penting, sebagaimana diamanatkan UU Penyiaran No. 32 tahun 2002, yang menyebutkan penyelenggaraan penyiaran adalah untuk memperkuat integrasi nasional (Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2002).

### PERS DAN KETAHANAN NASIONAL

Ketahanan Nasional sesungguhnya merupakan gambaran dari kondisi tata kehidupan nasional pada saat tertentu (Sunardi, 1997: 9). Kondisi tersebut sangat dinamis, sehingga ketahanan nasional dapat dirumuskan sebagai kondisi dinamik suatu bangsa berisi kesatuan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan yang baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri, langsung maupun tidak langsung yang membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa (Sunardi, 1997: 2).

Daerah perbatasan dengan segala persoalannya, merupakan salah satu "titik panas" yang bila tidak mendapat perhatian dapat menimbulkan *deftan* dengan negara tetangga. Permasalahan bisa dimulai dari ketimpangan ekonomi (pembangunan infrastruktur); perkembangan politik, dan budaya yang bisa mengarah pada sengketa perbatasan (Prescott, 1987). Potensi disintegrasi bangsa perlu mendapat perhatian melalui pendekatan integrasi nasional, yaitu suatu keadaan yang menurut Harsja W. Bachtiar (1993): keadaan di mana penduduk yang berbeda suku, agama, ataupun golongan, tetap bisa berinteraksi dengan golongan lain tanpa merasa dirugikan.



Salah satu penyebab terjadinya disintegrasi nasional, adalah kecemburuan sosial (Sunardi, 1997; Magenda, 2001) akibat merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah terkait ketersediaan fasilitas sosial-ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Dalam konteks tersebut, kemajuan komunikasi dan transportasi di perbatasan menjadi penting, sebab keduanya merupakan komponen integrasi. Kecemburuan sosial bisa timbul akibat tidak meratanya infrastruktur pembangunan –termasuk infrastruktur penyiaran. Pembangunan di kawasan perbatasan yang lambat bisa menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat di sana bahwa mereka tidak diperhatikan sehingga tentan menimbulkan sentimen primordial, dan sentimen primordial bisa menimbulkan pemikiran separatisme (Lipbart, 1977). Masyarakat Quebec yang mayoritas berbahasa Perancis, misalnya, mengajukan referendum memisahkan diri dari Kanada yang mayoritas berbahasa Inggris, merupakan contoh bagaimana primordialisme melahirkan pemikiran separatisme.

Pada sisi lain, ketahanan nasional memerlukan media massa sebagai salah satu variabel untuk menumbuhkan nasionalisme. Media itu sendiri juga dapat menjadi tempat menyalurkan aspirasi baik yang bersifat positif maupun negatif, bahkan yang bersifat wacana separatisme. Termasuk di dalam hal ini adalah penggunaan media sosial yang subur digunakan menyebarkan pesan-pesan ke khalayak luas. Sejuah ini mungkin infrastruktur di perbatasan membuat penemuan media sosial belum membudaya di sana sehingga media baru tidak digunakan untuk menyatukan gagasan yang bertubuhan dengan sentimen primordial ataupun perasaan diperlakukan tidak adil.

Weggins (1977), menyebut salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mencegah disintegrasi bangsa adalah memperkuat integrasi nasional melalui menciptakan kesejahteraan masyarakat yang didapat dari pertumbuhan ekonomi. Jaringan kegiatan usaha masyarakat yang berkembang akan menjauhkan orang-orang dari pemikiran untuk melakukan kegiatan separatisme. Pertumbuhan ekonomi yang baik haruslah menetes hingga ke

perbatasan sehingga pembangunan berbagai infrastruktur akan mendorong tumbuhnya perekonomian yang berdampak kesejahteraan rakyat di sana.

Dengan rakyat sejahtera dan wilayah perbatasan memiliki infrastruktur penyiaran, rakyat memperoleh asupan informasi memadai sekaligus mengimbangi *pull over* dari negara tetangga. Rakyat di sana mempunyai pilihan untuk menikmati siaran dari negeri sendiri atau dari negeri tetangga. Inforesitu sendiri sesungguhnya dapat dipakai untuk menjaga keutuhan wilayah serta integrasi sosial masyarakat (Naina, 2008: 648). Rakyat di perbatasan bagaimanapun akan mengkonsumsi siaran dari negaranya sendiri sehingga penyiaran pesan kepada mereka terjaga alur distribusinya.

Untuk menjaga nasionalisme di perbatasan, asupan informasi melalui elemen penyiaran nasional mutlak terus dilakukan. Terkait dengan premis tersebut, berikut ini disampaikan tiga preposisi.

Preposisi pertama: *membangun infrastruktur penyiaran yang tepat guna*. Pemanfaatan integrasi nasional di perbatasan bisa dilakukan bila pembangunan infrastruktur penyiaran bersamaan dengan pembangunan bidang-bidang lainnya terus menerus diupayakan. Dari pembangunan infrastruktur diharapkan muncul *multiplex effect* bagi masyarakat di perbatasan. Mereka juga akan memiliki pilihan dalam mengkonsumsi media penyiaran, hal itu sekaligus merupakan upaya mengimbangi tayangan-tayangan media asing. Dalam hal membangun infrastruktur penyiaran di perbatasan sepenuhnya bersandar pada pemerintah, setidaknya pada Televisi RI (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) yang dibiayai dari APBN, sebab-swasta masih sulit untuk diajak berkarya di sana.

Pembangunan infrastruktur itu haruslah tepat guna agar bisa digunakan secara efektif dengan melibatkan *stake holder*. Pembangunan stasiun relay untuk RRI/TVRI di perbatasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri di Bintan (Riau Kepulauan), Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, misalnya, merupakan contoh adanya malkoordinasi birokrasi



dalam membangunannya. Akibatnya, stasiun *relay* itu belum bisa difungsikan (Budiono, 2012).

...[ ] Di perbatasan Kalbar dengan Malaysia Timur, dibangun 10 pemancar relay besar dengan kekuatan rata-rata 2,5 KW lengkap dengan menara antena setinggi 70 meter. Stasiun relay kecilnya 22 buah. Yang besar ditempatkan dilokasi kecamatan sedangkan yang kecil di desa-desa. Di kabupaten Sanggau stasiun relay besar berlokasi di kecamatan Sekayam dan Entikong, tidak jauh dari lokasi stasiun RRI beserta pemancarnya. Jika menyusuri jalan dari arah Pontianak menuju Entikong di sebelah kanan jalan dapat dilihat menara pemancar radio dan televisi yang kokoh menjulang. Di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur jumlah stasiun relay besar berjumlah 15 unit sedangkan stasiun relay kecil mencapai 32 buah (Budiono, 2012).

Menurut Kabu Budiono, Direktur Program dan Produksi RRI, pembangunan stasiun relay itu tidak melibatkan RRI, sehingga mereka belum bisa menggunakannya, sementara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak bisa mengoperasikannya sebab tidak punya stasiun radio. RRI Entikong, masih menggunakan pemancar 1 Kw milik mereka sendiri, jauh lebih kecil daripada 5 Kw milik Kemendagri tersebut.

...[ ] Kepala RRI Entikong Redno Dedy menyatakan sudah berkrim surat menanyakan kemungkinan penggunaan pemancar tersebut untuk menguatkan fungsi RRI di perbatasan. Sudah dibayangkan, jika nanti dapat memanfaatkan pemancar 'mengganggu' berkekuatan 5 KW, siaran akan semakin bagus diterima masyarakat dengan jangkauan wilayah yang lebih luas. Tetapi surat permohonan Kepala RRI Entikong itu belum ada tindak lanjutnya (Budiono, 2012).

Sementara itu, dalam mengimbangi *spill over* di perbatasan, RRI telah melakukan langkah strategis dengan membangun apa yang mereka sebut "Sabuk Pengaman Informasi" (*Information Safety Belt*) sejak tahun 2008.

Sabuk pengaman itu merupakan sabuk imajiner yang melingkari seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk siaran radio yang didukung penguatan pemancar dan pendirian studio produksi di sepanjang daerah perbatasan mulai dari Sabang sampai Merauke (Hadi, 2014).

Dengan adanya stasiun produksi, program siaran dapat dibuat sesuai keperluan lokal masyarakat perbatasan. Langkah itu lebih maju daripada membuat stasiun relay yang hanya meneruskan siaran dari stasiun pusat/daerah. Saat ini sudah ada 21 studio produksi di daerah perbatasan maupun daerah terpencil, antara lain di Nangroe Aceh Darussalam (Tukergen, Sabang, Aceh Singkil), Sendawar, Nunukan (Kalim), Batam (Riau Kepulauan), Entikong (Kalbar), Malinau (Kalut), Ampara (Suhong), Atambua (NTT), Skow, Boven Digul, Puncak Jaya, Oksibil, Mappi, (Papua), Saumlaki (Maluku), Kaimana (Papua Barat). Studio produksi di Entikong, bahkan sudah ditingkatkan menjadi stasiun penyiaran RRI, walaupun dengan kekuatan pemancar terbatas, 1 kilowatt (Budiono, 2012).

Upaya yang dilakukan RRI tersebut dipadukan dengan usaha yang dilakukan Kemendagri dalam membangun stasiun *relay* sesungguhnya bila disinergikan, sangat efektif dalam menyebarkan informasi di perbatasan guna menambahkan semangat nasionalisme sebagaimana telah dilakukan sebelumnya. Sayangnya, upaya yang dilakukan RRI belum diikuti TVRI, televisi swasta nasional, dan juga media massa cetak. Oleh karena itu masih diperlukan upaya penyadaran terhadap pengelola media massa agar bersedia menoleh ke perbatasan untuk menyisihkan dari sebagian keuntungan mereka guna membangun infrastruktur media massa di sana.

Preposisi kedua: *Perbanya perkuatan penetrasi siaran*. Terkait dengan preposisi pertama, maka di daerah perbatasan perlu perkuatan penetrasi siaran dengan memberdayakan media massa lokal, baik radio, televisi, maupun media cetak. Juga perlu ada inisiasi dari pemerintah daerah yang memiliki daerah perbatasan untuk mendorong tumbuhkembangnya media komunitas sebagai ajang interaksi warga



perbatasan. Selain itu, perbatasan penetrasi dapat dilakukan dengan mengubah kebijakan kekuatan daya pancar serta memberi mengajak pihak swasta ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) untuk membantu pertumbuhan media komunitas di perbatasan terutama dalam pelatihan sumber daya manusianya.

Pendekatan pembangunan yang dilakukan pemerintah di perbatasan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, kesejahteraan dan kelestarian lingkungan, juga perlu adanya pendekatan pemanfaatan media. Hal itu sesuai dengan arah pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2004 – 2025, dimana kawasan perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan dari berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking*.

Preposisi ketiga: *Menumbuhkembangkan lembaga penyiaran lokal*. Profil daerah perbatasan yang selama ini dianggap sebagai “serambi belakang” dengan kondisi misal infrastruktur, terisolir, masyarakatnya miskin, dan sumber daya manusianya terbatas, harus diubah dengan metode pembelajaran masyarakat menggunakan media massa. Dalam kaitan itu maka informasi yang disebarluaskan media massa baik cetak ataupun penyiaran, menjadi tampan. Untuk itu pembangunan lembaga penyiaran lokal menjadi solusi, sebab berada di sekitar masyarakatnya.

Untuk maksud seperti itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sesungguhnya telah membenarkan kemudahan peningkatan infrastruktur penyiaran dan memberi kebijakan khusus bagi penyiaran perbatasan (KPI, 2012: 10-12). Namun hal itu belum dapat diimplementasikan karena keterbatasan sumber daya manusia, dan modal. Untuk itu perlu *political will* dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam membangun dan menumbuhkembangkan penyiaran lokal di perbatasan. Tumbuhkembangnya media penyiaran lokal di perbatasan merupakan jaring pengaman informasi dalam membangun dan menjaga semangat nasionalisme dan kemungkinan songroangan pihak lain.

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dengan memperhatikan analisis yang diuraikan sebelumnya adalah sebagai berikut:

Ketahanan nasional suatu negara merupakan hal penting yang selalu harus dipelihara demi kelangsungan hidup sebuah bangsa. Sebagai negara bangsa (*nation-state*), Indonesia berkepentingan menjaga nasionalisme rakyat di seluruh yurisdiksi nasional, termasuk di daerah perbatasan yang infrastrukturnya belum memadai dengan menghadirkan informasi dari media massa nasional baik media cetak, elektronik, maupun *cyber* guna mengimbangi *spill over* siaran dari negara tetangga.

Daerah perbatasan perlu mendapat perhatian akibat terjadinya kesenjangan kesejahteraan masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya pembangunan infrastruktur serta kuatnya *spill over* siaran negara tetangga. Kondisi seperti itu harus diaktifkan guna mencegah disintegrasi nasional yang disebabkan munculnya sentimen primordial, rasis cemburu dan perasaan diperlakukan tidak adil oleh pemerintah.

Penetrasi siaran ke perbatasan mendesak dilakukan dengan membangun infrastruktur penyiaran lokal, dan nasional yang diperkaya dengan pemberdayaan lembaga penyiaran lokal dan lembaga penyiaran komunitas.

Masyarakat di perbatasan harus mendapat asupan informasi yang menjadi hak mereka agar perkuatan nasionalisme masyarakat di sana terus berlangsung.

Diperlukan *political will* dari seluruh *stake holder* untuk memberatifikasi perbatasan dengan menyalurkan dana CSR perusahaan swasta maupun BUMN guna membangun lembaga penyiaran lokal maupun komunitas di perbatasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). (2011). *Semangat Baru Mengubah Perbatasan Negara, Refleksi dan Proyeksi*. Jakarta.
- Burbano, Kabul. (2012). <http://regional.kompasiana.com/2012/08/25/antara-cfckurvis-siaran-radio-perbatasan-dan-pertumbuhan-anggaran-487786.html>.
- Hadi, Pami. (2014). <http://bankum.kompasiana.com/2014/04/08/saluk-pengaman-informasi-perbatasan-ncn-645632.html>
- Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. (2012). *Profil dan Dinamika Penyiaran di Daerah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia*.
- Lijphart, Arend. (1977). *Political Theories and The Explanation of Ethnic Conflict in the Western World: Field Production and Plausible Participation*, dalam Milton Haman (ed), *Ethnic Conflict in the Western World*. Ithaca: Cornell University Press.
- Magenda, Burhan. (2001). *Integrasi Nasional Dalam Masyarakat Indonesia yang Majemuk*, dalam Majalah Telesia, edisi Januari-Februari 2001.
- Moddoko. (2014). *Kompleksitas Pengelolaan Perbatasan: Tinjauan dari Perspektif Kelangkaan Pengelolaan Perbatasan Indonesia*, dalam U-journal Universitas Pertaahan, 4 Mei 2012.
- Naina, Akhmadriyah. (2008). *Reformasi Departemen Penerangan*, dalam 75 Tahun M. Ali Dablan: Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Patton, Aedi. (2009). *Pembangunan Perbatasan dalam Dimensi Partisipatif* (edn), *Emerge Partisipatif: Opini Saritas Tokoh Mengenal Indonesia di Era NBY*. Jakarta: Red & White Publishing.
- Prescott, J.R.V. (1987). *Political frontiers and Boundaries*. London: Allen and Unwin.
- Siregar, Amir Liffendi. (2013). *Model Bisnis Baru Media Cetak*, dalam *Media Division 2013/2014: Integrasi Multi Platform & Monetisasi Digital*. Jakarta: Serikat Pekerja Surabakar.
- Sumansono, Son. (2014). <http://medialicenter.batamkota.gov.id/masyarakat-perbatasan-igibh-banyak-rilumasi-siaran-asing/>
- Sinardi, RM. (1997). *Teori Ketahanan Nasional*. Jakarta: Himpunan Alumni Studi Ketahanan Nasional.
- SK, Wahyuni. (2007). *Indonesia Negara Maritim*. Jakarta: Yayasan Senopati Nuaantara.